

RINGKASAN BERTA HARI INI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



Ketua H. Usman, M.Kes Wakil Ketua Bambang Riyoko, SE Wakil Ketua Kayan, SH Wakil Ketua Dr. H. Emir Firdaus ST., MM.

Komisi C DPRD Sidoarjo Siap Mengawal Pembangunan Jalan Betonisasi Penghubung Antardesa

Komisi C DPRD Sidoarjo Siap Mengawal Pembangunan Jalan Betonisasi Penghubung Antardesa

Sidoarjo, Memorandum
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada semester III tahun ini mengulangi pengujian proyek betonisasi jalan yang menghubungkan antardesa antarkacamatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor AI memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang akan dikerjakan pada tahun ini dan Agustus 2023.

Langkah ini mendukung dukungan dari Komisi C, Terutama dalam rangka mendukung pembangunan antardesa antarkacamatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor AI memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang akan dikerjakan pada tahun ini dan Agustus 2023.

Langkah ini mendukung dukungan dari Komisi C, Terutama dalam rangka mendukung pembangunan antardesa antarkacamatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor AI memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang akan dikerjakan pada tahun ini dan Agustus 2023.

Langkah ini mendukung dukungan dari Komisi C, Terutama dalam rangka mendukung pembangunan antardesa antarkacamatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor AI memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang akan dikerjakan pada tahun ini dan Agustus 2023.

Jangan Ada Pemecatan Pegawai Honorer

Ada 8.754 Pegawai Non-ASN di Sidoarjo

Sidoarjo, SiRIVA - Aturan baru terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan pegawai honorer di Kabupaten Sidoarjo. Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka.

Menurut Wicaksono, ada 8.754 pegawai non ASN di Kabupaten Sidoarjo. Mereka tersebar di berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan. Mereka merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka jika aturan baru diterapkan.

Menurut Wicaksono, ada 8.754 pegawai non ASN di Kabupaten Sidoarjo. Mereka tersebar di berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan. Mereka merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka jika aturan baru diterapkan.

Anggarkan Rp 1,6 M untuk Perbaikan Jembatan Prasing

BUDURAN Perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo terus berlanjut. Dalam waktu dekat, Pemkab Sidoarjo akan mengalokasikan Rp 1,6 miliar untuk perbaikan Jembatan Prasing. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan penting di Kabupaten Sidoarjo.

Perbaikan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pemkab Sidoarjo berharap dengan perbaikan ini, jembatan akan lebih tahan lama dan aman digunakan.

Perbaikan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pemkab Sidoarjo berharap dengan perbaikan ini, jembatan akan lebih tahan lama dan aman digunakan.

Diperbanyak Bagian Persidangan dan Perindang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SIDOARJO



Ketua
H. Usman, M.Kes



Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE



Wakil Ketua
Kayan, SH



Wakil Ketua
Dr. H. Emir Firdaus ST., MM.



Komisi C DPRD Sidoarjo Siap Mengawal Pembangunan Jalan Betonisasi Penghubung Antardesa

Pantau Status Gizi Warga Kalikajang dan Pucukan

Dilakukan Rutin Setiap Bulan

HIPERTENSI dan penyakit gatal menjadi dua masalah kesehatan yang paling banyak ditemui di Dusun Kalikajang dan Pucukan, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo. Dua wilayah itu berada di ujung timur Sidoarjo, di tengah area tambak dan dekat dengan laut.

Akses menuju ke sana tak mudah. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam menggunakan kapal untuk sampai di Pucukan. Dilanjutkan perjalanan darat selama 30 menit untuk menjangkau Kalikajang.

Kondisi itu mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo H Usman MKes. Bertepatan dengan peringatan Bulan Peduli Posyandu, Usman turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat setempat. Dia menampung banyak aspirasi warga. Bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan.

Sulitnya akses menuju dua daerah terpencil itu membuat fasilitas kesehatan sangat terbatas. Warga harus menyeberang menggunakan kapal atau perahu untuk sampai ke faskes terdekat. Masalah semakin kompleks jika ada ibu hamil maupun masyarakat dalam kondisi gawat darurat. Di sana, Usman berbincang langsung dengan para ibu dan warga lain.

"Saya berterima kasih karena kader Puskesmas Sekardangan sudah proaktif mengatasi masalah-masalah kesehatan di sini. Karena kesehatan, khususnya di daerah terpencil, harus jadi prioritas bersama," ungkap Usman.

Puskesmas Sekardangan rutin melakukan aksi jemput bola ke wilayah Kalikajang dan Pucukan guna memantau kesehatan masyarakat. Agendanya adalah pelayanan kesehatan untuk



PERHATIAN SERIUS: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo H Usman MKes meninjau langsung kesehatan warga Kalikajang dan Pucukan.



masyarakat dan giat posyandu. Sementara itu, dalam kondisi darurat, biasanya masyarakat menelepon pihak puskesmas dan mendapat prioritas layanan.

"Setiap bulan sudah rutin ada posyandu dan kami pantau terus status gizi warga. Saat ini tercatat ada satu ibu hamil trimester pertama di Kalikajang. Kami juga membawa obat-obatan untuk warga. Di sana juga banyak keluhan gatal-gatal karena sulitnya akses air bersih," terang Kader Promosi Kesehatan Puskesmas Sekardangan Paramita Ismaniar.

Siap Tindak Lanjuti soal Infrastruktur

Di Kalikajang, masih banyak jalan belum beraspal. Jika pun sudah dicor, kondisinya mulai rusak kembali. Bahkan saat hujan, jalanan tak lagi bisa dilalui. "Kaki sampai mancep," kata warga Kalikajang Rosadi saat berbincang dengan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes.

Rosadi yang mulai lahir sudah tinggal di Kalikajang berharap jalan antarkampung bisa terhubung. "Jadi, kalau ada apa-apa, antarkampung sudah bisa cepat saling bantu," lanjutnya. Jika hujan, mau takziah saja susah karena harus jalan kaki. Lokasi makam pun terletak jauh dari permukiman warga.

Tak sekadar berbincang dan menampung aspirasi warga, Usman juga berkeliling melihat langsung kondisi jalanan. Dia diantarkan warga menggunakan sepeda motor. Jika jalan tak bisa dilalui, Usman menyusuri lokasi sambil jalan kaki. Total ada 120 KK di Kalikajang yang mengharap respons cepat pemerintah.

Usman juga mencari tahu soal fasilitas pendidikan. Di wilayah itu hanya tersedia TK dan madrasah ibtidaiyah (setara SD). Sementara itu, banyak lulusannya yang melanjutkan sekolah ke wilayah perkotaan.

"Anak-anak Kalikajang kalau ingin melanjutkan sekolah ke Sidoarjo, saya rekomendasikan diberi prioritas untuk diterima di sekolah negeri. Sehingga biayanya lebih ringan," tutur Usman. (nad/c12/xav)



Saya berterima kasih karena kader Puskesmas Sekardangan sudah proaktif mengatasi masalah-masalah kesehatan di Kalikajang dan Pucukan. Karena kesehatan, khususnya di daerah terpencil, harus jadi prioritas bersama."

H USMAN MKES
Ketua DPRD Sidoarjo

MEMORANDUM
PEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Jawa Pos

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk Standarisasi Pelayanan

Gus Muhdlor Siapkan Persetujuan Pusat Soal Holding BLUD RSUD Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Usulan pembentukan holding manajemen pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo diharapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Jika dalam waktu dekat restu itu dikantongi, maka Pemkab Sidoarjo bakal menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali menerapkan sistem pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah dalam satu manajemen Holding yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.

Keinginan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali itu bukan tanpa alasan. Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menginginkan adanya standarisasi layanan di semua rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo. Selain itu, pembentukan holding BLUD RSUD dinilai lebih efektif dan efisien.

Apalagi, dibentuknya holding akan memudahkan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari sistem manajemen hingga mutu pelayanan.

"Saat ini, kita punya dua rumah sakit daerah. Yakni RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dengan manajemen pengelolaan sendiri-sendiri. Ke depan kalau holding terbentuk, maka cukup satu manajemen induk

yang mengontrolnya. Ini jauh lebih efektif dan yang paling penting standar pelayanan rumah sakit yang dimiliki Pemkab Sidoarjo nantinya bisa terjaga mutunya," ujar Gus Muhdlor di sela-sela acara Ground Breaking Pembangunan Gedung Pusat Terpadu RSUD Sidoarjo, Sabtu (08/07/2023).

Akhir Tahun 2023, kata Gus Muhdlor RSUD Sidoarjo ditargetkan mengantongi sertifikasi Rumah Sakit Tipe A. Jika target itu tercapai, maka Sidoarjo menjadi kabupaten satu-satunya di Indonesia yang memiliki rumah sakit dengan tipe A.

"Di Jawa Timur hanya ada tiga Rumah Sakit yang sudah Tipe A yakni RS dr Soetomo Surabaya, RS dr Saiful Anwar Malang (keduanya milik Pemprov Jatim) serta RSPAL dr Ramelan Surabaya milik TNI AL," imbuh alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Upaya RSUD Sidoarjo untuk naik ke tipe A ini, salah satunya adalah pembangunan Gedung Pusat Terpadu yang Sabtu dilakukan ground breaking di halaman RSUD Sidoarjo.

Proyek ini, menjadi salah satu langkah besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. "Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya dalam meningkatkan perbaikan layanan kesehatan.



GROUND BREAKING - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali didampingi Direktur Utama RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan Sp P dan Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyaksikan proses Ground Breaking pembangunan gedung 7 lantai RSUD Sidoarjo, Sabtu (08/07/2023).

Salah satunya dengan membangun sistem holding rumah sakit itu," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Bagi Gus Muhdlor beberapa rumah sakit di Sidoarjo dari tipe C wajib naik menjadi tipe B. Sedangkan Tipe B naik menjadi Tipe A begitu seterusnya.

"Ke depan, saya ingin orang yang berkunjung ke rumah sakit ini, tidak hanya orang-orang yang sakit. Tentunya, dengan terus

berbenah pelayanannya, maka orang sehat pun bisa ke rumah sakit. Misalnya dengan pemberian vitamin agar tetap sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari," ungkapnya.

Perbaikan layanan serta sarana dan prasarana yang terus memadai di Rumah Sakit yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo ini, nantinya juga ikut mengerek kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sido-

arjo. Apalagi saat ini, IPM Sidoarjo sudah sebesar 81,02 persen.

"Tentunya, dengan peningkatan IPM ini nanti, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat, serta kemakmuran seluruh masyarakat Sidoarjo," jelasnya.

Sementara Direktur Utama RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan Sp P menegaskan Gedung Pusat Terpadu (GPT) RSUD Sidoarjo akan menjadi bangunan modern

yang menawarkan fasilitas terkini dan teknologi canggih. Proyek ini, dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan pembangunan gedung baru ini, RSUD Sidoarjo akan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan memperluas jangkauan serta kualitas layanan medis yang disediakan.

"Proyek GPT menjadi bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Kami berharap, dengan adanya gedung baru ini, kami dapat meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Tipe A dan memenuhi standar layanan yang lebih tinggi," paparnya.

Pembangunan Gedung Pusat Terpadu RSUD Sidoarjo ini, kata Atok menyerap anggaran sebesar Rp70 Miliar. Bangunan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2023 mendatang. Nantinya, gedung ini akan dibangun sebanyak tujuh lantai. Diantaranya lantai satu dan dua untuk layanan geriatri dan rehabilitasi medik, selanjutnya lantai tiga dan empat untuk poli spesialis dan lantai lima, enam serta lantai tujuh untuk pusat perkantoran RSUD Sidoarjo serta perkantoran Dewan Pengawas. (par/ian)

Seluruh Diuruk

memo X

Komisi C DPRD Sidoarjo Siap Mengawal Pembangunan Jalan Betonisasi Penghubung Antardesa

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada semester III tahun ini mengebut pengerjaan proyek betonisasi jalan yang menghubungkan antardesa antarkecamatan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang dikubut pengerjaannya mulai Juli dan Agustus 2023.

Langkah ini mendapat dukungan dari Komisi C. Terutama dukungan datang dari Komisi C yang salah satu tupokasinya membidangi infrastruktur.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Suyarno SH MH misalnya dengan tegas menyatakan dukungannya atas langkah pemkab mengebut proyek betonisasi jalan antardesa antarkecamatan yang kini tengah digenjoy pemkab. "Kita siap mengawal pembangunan proyek betonisasi jalan antardesa antarkecamatan," tegas Suyarno.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tinggal di Wonoprintahan, Prambon itu menyebutkan banyak jalan desa, jalan penghubung antardesa, dan jalan penghubung antardesa yang kondisinya mengesankan.

Meski berkali-kali diaspal jalan itu cepat rusak. Maka langkah pemkab dengan melakukan betonisasi tersebut memang langkah yang tepat.

"Kalau tidak dibeton dan hanya diaspal bakal muncul masalah lagi dalam waktu dekat karena aspal cepat rusak setelah terendam air atau dilalui kendaraan berat. Karena itu perlu dibeton agar bisa tahan lama dan rakyat tidak lagi dipusingkan dengan masalah jalan yang rusak di sana-sini," jelas Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Sidoarjo itu.

Suyarno yang juga tercatat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Sidoarjo itu menambahkan dalam pembangunan betonisasi jalan antardesa antarkecamatan pemkab harus memakai skala prioritas. Jalan mana dulu yang harus digarap perlu dipikirkan matang-

matang. "Betonisasi jalan yang mendesak digarap secepatnya harus digarap dan dituntaskan. Ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jalan yang sudah lama membuat rakyat tersiksa karena rusak di sana-sini secepatnya digarap," jentreh Suyarno.

Suyarno juga memaparkan pemkab tidak mungkin melakukan pembangunan jalan dan betonisasi dalam satu tahun apalagi satu semester. Jalan yang begitu banyak, pembangunannya memerlukan anggaran yang sangat besar.

Namun secara terencana jalan-jalan itu harus dibangun pemkab secara berkesinambungan dengan target semua jalan itu nantinya bisa mulus dan tidak rusak di sana-sini lagi. "Mana yang didahulukan, pemkab pasti tahu karena sudah sering cek ke lapangan. Kita juga akan sering turun ke lapangan untuk melakukan sidak," tandas Suyarno.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Anang Siswandoko ST juga mengemukakan hal senada. Politisi Partai Gerindra yang dikenal vokal itu bahkan menegaskan pihaknya tidak hanya akan mengawal proyek pembangunan betonisasi jalan antardesa antarkecamatan yang kini gencar dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Namun, pihaknya juga akan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan-mnya mulai proses lelang, saat pengerjaan hingga saat jalan itu digunakan masyarakat. "Pengawasan akan kita lakukan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dan berjalan sesuai rencana," tegas politisi yang berangkat dari profesi kontraktor ini.



Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Suyarno



Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Anang Siswandoko

Menurut Suyarno, pihaknya tidak hanya akan gencar melakukan sidak ke lapangan. Tetapi juga akan kerap menggelar rapat dengar pendapat (hearing). Langkah-langkah itu dilakukan agar pembangunan proyek betonisasi jalan antardesa antarkecamatan itu berjalan sesuai rencana.

"Jangan sampai proyek yang memakai anggaran negara begitu besar diselewengkan. Akan kita kawal, kita kontrol dan kita awasi. Pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan kalau ada penyimpangan akan kita tegur agar tidak menyimpang," tutur Anang.

Sekadar catatan, Pemkab Sidoarjo pada semester III tahun ini mengebut pengerjaan proyek betonisasi jalan yang menghubungkan antardesa antarkecamatan. Gus Muhdlor panggilan akrab Bupati Sidoarjo memastikan ada sembilan proyek jalan beton yang dikubut pengerjaannya mulai Juli dan Agustus.

"Ada lima ruas jalan yang mulai dikerjakan pada Juli. Kelima ruas jalan itu yaitu Jalan Desa Banjarsari-Damarsih Kecamatan Buduran; Jalan Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati; Jalan

saat berpaspas," katanya.

Bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mendorong percepatan pengerjaan proyek betonisasi sesuai dengan target pekerjaan. Ia meminta pengerjaan di sembilan titik jalan beton itu rampung tepat waktu.

"Selain harus tepat waktu, saya minta pengawasannya dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) diperkuat. Rampung sesuai target tapi harus sesuai perencanaan," tegas Gus Muhdlor.

Bupati pernah anugerah pemimpin perubahan dan tokoh penggerak pembangunan infrastruktur itu menyampaikan bahwa sembilan ruas jalan yang dibeton tersebut merupakan jalan yang padat dilalui kendaraan. Seperti ruas Jalan Tarik-Milirip merupakan akses jalan alternatif yang menghubungkan Sidoarjo dan Mojokerto.

"Ruas Jalan Tulangan-Durungbedug juga padat sekali saat pagi dan sore hari. Karena akses ini jalan alternatif warga Tulangan menuju kota Sidoarjo. Begitu juga ruas Jalan Bringinbendo-Tanjungsari di mana jalan ini selalu padat kendaraan para pekerja dan anak-anak sekolah," beber Gus

Muhdlor.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Pemkab Sidoarjo Rizal Asnan menyampaikan progres pekerjaan betonisasi di sembilan ruas jalan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Seperti, ruas Jalan Banjarsari-Damarsih sudah mulai pemasangan pemasangan batu penahan. Ruas Tarik-Milirip mulai dilakukan peninggian pemasangan batu dan peninggian badan jalan.

"Kemudian ruas Jalan Tulangan-Durungbedug mulai pemasangan batu dan menunggu kedatangan material U-Ditch," ujar Rizal.

Rizal mengaku sejauh ini tidak ada kendala di lapangan. Meski begitu pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat pengerjaan di lapangan terutama dalam hal kualitas yang harus sesuai dengan perencanaan.

"Dari lima ruas yang dikerjakan mulai Juli ini tidak ada kendala semua sudah on track. Sisanya yang empat titik mulai dikerjakan pada Agustus. Pengerjaan kita pantau tiap saat prinsipnya proyek jalan beton selesai tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan," pungkasnya. (adv/kri/jok/aw)



MEMORANDUM
BERKERAJAAN DAN MEMBELA TANAH AIR

Jangan Ada Pemecatan Pegawai Honorer

► Ada 8.754 Pegawai Non-ASN di Sidoarjo

SIDOARJO, SURYA - Aturan baru terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah diharapkan tidak menjadi alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melakukan pemecatan atau memberhentikan para pegawai honorernya.

Komisi A DPRD Sidoarjo berharap, Pemkab bisa mengambil kebijakan strategis dalam upaya penataan terhadap para pegawai non ASN (aparatur sipil negara) atau honorer tersebut.

Ketika pegawai honorer harus dihapus, mereka bisa diikuti rekrutmen ASN, ikut seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau diusulkan untuk diangkat lewat Surat Keputusan (SK) Bupati.

"Yang tidak lolos seleksi atau tidak bisa ikut rekrutmen ASN atau PPPK, kami usulnya diangkat lewat SK Bupati," kata Anggota Komisi A DPRD

Sidoarjo, Warih Andono.

Terhitung ada sekira 8.754 orang pegawai non ASN di Pemkab Sidoarjo. Itu termasuk sopir, keamanan, staf di berbagai instansi, guru, dan sebagainya.

"Selama ini mereka sudah bekerja, artinya mereka dibutuhkan di instansi tempatnya bekerja," lanjut politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Warih Andono, metode pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai sudah pernah dilakukan Pemkot Surakarta. Dan tentunya bisa diadopsi atau dilakukan juga di Sidoarjo.

"Kalau tidak ditata dengan baik kasian mereka yang sudah mengabdikan bertahun-tahun, harus ada apresiasi untuk mereka," sambungnya.

Sebanyak 8.754 orang pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu tersebar di berbagai instansi.

Paling banyak di DLHK

STORY HIGHLIGHTS

- DPRD berharap Pemkab bisa ambil kebijakan strategis.
- Ada sebanyak 8.754 orang pegawai non ASN.
- Mulai 28 November tidak boleh merekrut pegawai honorer.



SURYA/M. TAUFIK

RAPAT - Suasana rapat BKD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan Komisi A DPRD setempat guna membahas soal pegawai non ASN atau honorer.

sebut," kata Plt Kepala BKD Sidoarjo, Mahmud.

Menurutnya, mulai 28 November 2023 nanti, aturannya memang tidak boleh merekrut atau tidak boleh ada honorer.

"Tapi bukan berarti mereka ini di-PHK. Sehingga pemerintah berusaha melakukan penataan terhadap para pegawai non ASN tersebut," lanjutnya.

Sejauh ini BKD masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk menentukan langkah. Kendati

demikian, pihaknya juga mengaku telah menyiapkan beberapa alternatif. Di antaranya, rencana rekrutmen PPPK dan ASN, serta alternatif alih daya menjadi pegawai outsourcing.

Kendati demikian tidak semua pegawai non ASN dapat memenuhi syarat mengikuti seleksi formasi PPPK. Dari data yang ada, hanya sekira 2.392 orang yang secara persyaratan bisa ikut seleksi PPPK. Sehingga butuh kebijakan strategis lain menangani persoalan ini. (af)

SURYA

Polresta Sidoarjo Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Terbaik 2023 dari Kapolri

Sidoarjo, Memorandum

Masih rangkaian HUT ke-77 Bhayangkara, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada polda, polrestabes, polresta, dan polres. Salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah Polresta Sidoarjo.

Penghargaan dari Kapolri kali ini yang diterima Polresta Sidoarjo adalah terkait inovasi pelayanan publik terbaik dalam rangka Hari Bhayangkara. Penghargaan diserahkan Listyo kepada Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro dalam acara Musternbang

Polri tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua-Bali, Kamis (6/7).

Kapolresta mengatakan dengan diterimanya penghargaan dari Kapolri terkait inovasi pelayanan publik terbaik yakni layanan SKCK online dan SKCK keliling online diharapkan dapat

memacu semangat kinerja anggota Polresta Sidoarjo serta jajarannya dalam memberikan layanan ke masyarakat umum.

Sementara terkait inovasi SKCK online dan SKCK keliling online yang menjadi unggulan layanan Polresta Sidoarjo ini sengaja dibuat untuk lebih mempermudah dan mempercepat layanan pembuatan SKCK bagi masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini Polresta Sidoarjo juga menambahkan terobosan baru dengan menghadirkan

mobil layanan SKCK keliling online ditunjang fasilitas wifi dan kenyamanan pemohon di tiga wilayah. Antara lain Pasar Baru Porong, depan Mal Ramayana Krian, dan kompleks Ruko Tropodo Waru pada Selasa dan Kamis.

"Bahkan tidak hanya layanan SKCK saja, layanan masyarakat seperti pembuatan SIM dan layanan kepolisian lainnya akan terus ditingkatkan kualitas pelayanannya serta semakin inovatif," pungkas Kusumo. (kri/jok/nov)



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyerahkan piagam penghargaan inovasi pelayanan terbaik kepada Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

PAJAK DAERAH



IST

TEPAT WAKTU: Suasana pembayaran PBB yang dilakukan di kantor BPPD Sidoarjo.

Ajak Masyarakat Tertib Bayar PBB

KOTA-Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono mengimbau kepada masyarakat Sidoarjo agar membayar pajak. Terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tepat waktu.

Dia menyebutkan, batas waktu pembayaran PBB dengan ketetapan di atas Rp 500 ribu paling lambat

pada 16 Agustus. Sementara itu, untuk ketetapan di bawah Rp 500 ribu, batas waktu pembayarannya adalah 16 September.

● Ke Halaman 10



Ajak Masyarakat...

Untuk itu, diharapkan masyarakat Sidoarjo dapat membayarkan PBB sebelum batas waktu pembayaran. Karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang

menjadi prioritas bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo.

Ari juga menyoroti bahwa pembayaran pajak tepat waktu adalah kewajiban setiap warga negara yang bertujuan untuk membangun kemandirian dan keadilan sosial guna memperkuat keuangan negara. Dengan membayar pajak tepat waktu, ma-

sarakat secara langsung berkontribusi dalam memajukan daerahnya dan memastikan pelayanan publik yang optimal.

Menurut dia, saat ini, Kabupaten Sidoarjo telah memperbaiki sistem administrasi pajak untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

"Salah satunya adalah dengan memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran PBB langsung di gerai-gerai toko modern terdekat, mal, dan melalui Bank Jatim," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, partisipasi aktif masyarakat

dalam membayar pajak tepat waktu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, saya yakin Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi," tutupnya. (nis/vga)



Anggarkan Rp 1,6 M untuk Perbaikan Jembatan Prasung

BUDURAN-Perbaikan infrastruktur di Sidoarjo terus dikebut. Dalam waktu dekat, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) akan memperbaiki jembatan Prasung di Kecamatan Buduran.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, jembatan itu akan segera dibongkar secara total karena kondisinya yang sudah rusak parah. Ada banyak lubang yang berpotensi membahayakan pengendara yang melintas.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sigap merespon kondisi jembatan yang mengkhawatirkan tersebut. Pembongkaran jembatan dilakukan secepatnya untuk kemudian dibangun jembatan baru yang lebih kokoh dan aman.

Dwi menyebutkan, anggaran pembangunannya disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tahun ini sebesar Rp 1,6 miliar. Posnya untuk perbaikan jalan penghubung antar-



SEGERA DIPERBAIKI: Kondisi jembatan Prasung di Kecamatan Buduran yang akan dibangun kembali.

kecamatan tersebut.

Sebagai persiapan pembongkaran, pemasangan jembatan alternatif dari bambu telah dilakukan di sebelah jembatan yang akan dibongkar. Jembatan sementara ini akan

difungsikan untuk kendaraan roda dua agar tetap dapat melintas selama proyek pembangunan jembatan berlangsung.

"Kami akan melakukan pembangunan jembatan ini dengan

maksimal, sehingga jembatan benar-benar layak untuk dilintasi kendaraan," ujar Dwi.

Lebar jembatan baru yang akan dibangun nantinya sama dengan jembatan sebelumnya. Yaitu sekitar lima meter dengan panjang sembilan meter. Pembangunannya ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Sehingga awal 2024 dapat dilintasi oleh kendaraan. "Baik kendaraan kecil maupun berat," ujarnya.

Dwi berharap bahwa dana sebesar Rp 1,6 miliar yang telah disiapkan akan memberikan dampak positif. Jembatan baru diharapkan lebih baik dari sebelumnya dan mampu dilewati oleh semua jenis kendaraan.

Hingga saat ini, Dinas PUBMSDA masih menunggu penetapan pemenang lelang proyek pembangunan jembatan tersebut yang merupakan milik Pemkab Sidoarjo. Proses ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar pembangunan jembatan dapat dimulai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (nis/vga)

Jawa Pos

Tiga Titik Kerap Macet saat Volume Tinggi di Gedangan

Dishub Hanya Andalkan TL dan Pengaturan Manual

SIDOARJO - Imbas pembangunan *flyover* Aloha, *frontage road* (FR) dan Jalan Ahmad Yani, Gedangan, kerap macet saat volume kendaraan tinggi. Petugas tak bisa berbuat banyak, hanya mengandalkan *traffic light* (TL) dan pengaturan manual.

Pengaturan lalu lintas dengan *traffic light* pun tidak optimal saat volume kendaraan tinggi. Setidaknya, ada tiga titik kemacetan yang butuh penanganan lebih. Pertama, Jalan Ahmad Yani, Gedangan, dari utara ke selatan. Saat volume kendaraan tinggi, lalu lintas di sana macet. Misalnya, yang tampak kemarin (9/7) dan Sabtu (8/7) lalu.

Belum lagi, jika ada kereta api melintas, jalan pun ditutup. Durasi lampu merah di Jalan Ahmad Yani semakin lama sehingga antrean kendaraan mengular. "Memang penyebab utamanya ketika ada kereta, ekor kendaraan jadi semakin panjang. Imbasnya, waktu tunggu di semua sisi jadi lebih lama," jelas Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisunu kemarin. Kendaraan dari Jalan Ahmad Yani yang seharusnya bisa belok kiri ke Sedati terhalang kereta. Antrean kendaraan pun menumpuk.

Titik macet kedua, *frontage road* di perempatan Gedangan. Penyebab utamanya, ekor kendaraan dari timur ke barat menghalangi pengendara yang melintas di FR. Meskipun lampu di FR hijau, sering kali pengendara tidak bisa melaju karena terhalang antrean kendaraan dari timur menuju perempatan Gedangan.

Titik macet ketiga, depan Perumahan Puri Surya Jaya. Solusinya, dishub memasang *water barrier* agar



UJI KETABAHAN: Kendaraan memadati Jalan Raya Gedangan, Sidoarjo, kemarin (9/7). Kemacetan terjadi setiap hari di kawasan tersebut karena tingginya volume kendaraan yang melintas tidak sebanding dengan lebar badan jalan.

pengendara dari FR tidak bisa langsung belok kanan atau putar balik. Mereka diarahkan belok kiri dulu sampai bundaran Puri Surya Jaya, baru putar balik di bundaran tersebut. Sebenarnya sebelum itu atau di barat bundaran tersebut ada putar balik, tapi ditutup agar ada jarak lebih panjang untuk putar balik. "Putar baliknya harus di bundaran agar kendaraan tidak menumpuk di *frontage road*-nya," jelasnya.

Nah, setelah putar balik, pengendara yang akan menuju Surabaya harus belok kanan. Sementara ini, pihaknya tidak mengaktifkan TL untuk belok kanan

ke Surabaya tersebut. Artinya, pengendara bisa langsung. "Hanya dibantu petugas saat pagi dan sore. Kalau siang, biasanya ada supeltas yang membantu," kata Sunu.

Sunu menyebut jika TL dioperasikan untuk pengendara yang akan belok kanan, waktu tunggu bagi kendaraan yang akan putar balik lebih lama. Sedangkan terkadang kendaraan dari selatan ke utara tidak begitu ramai.

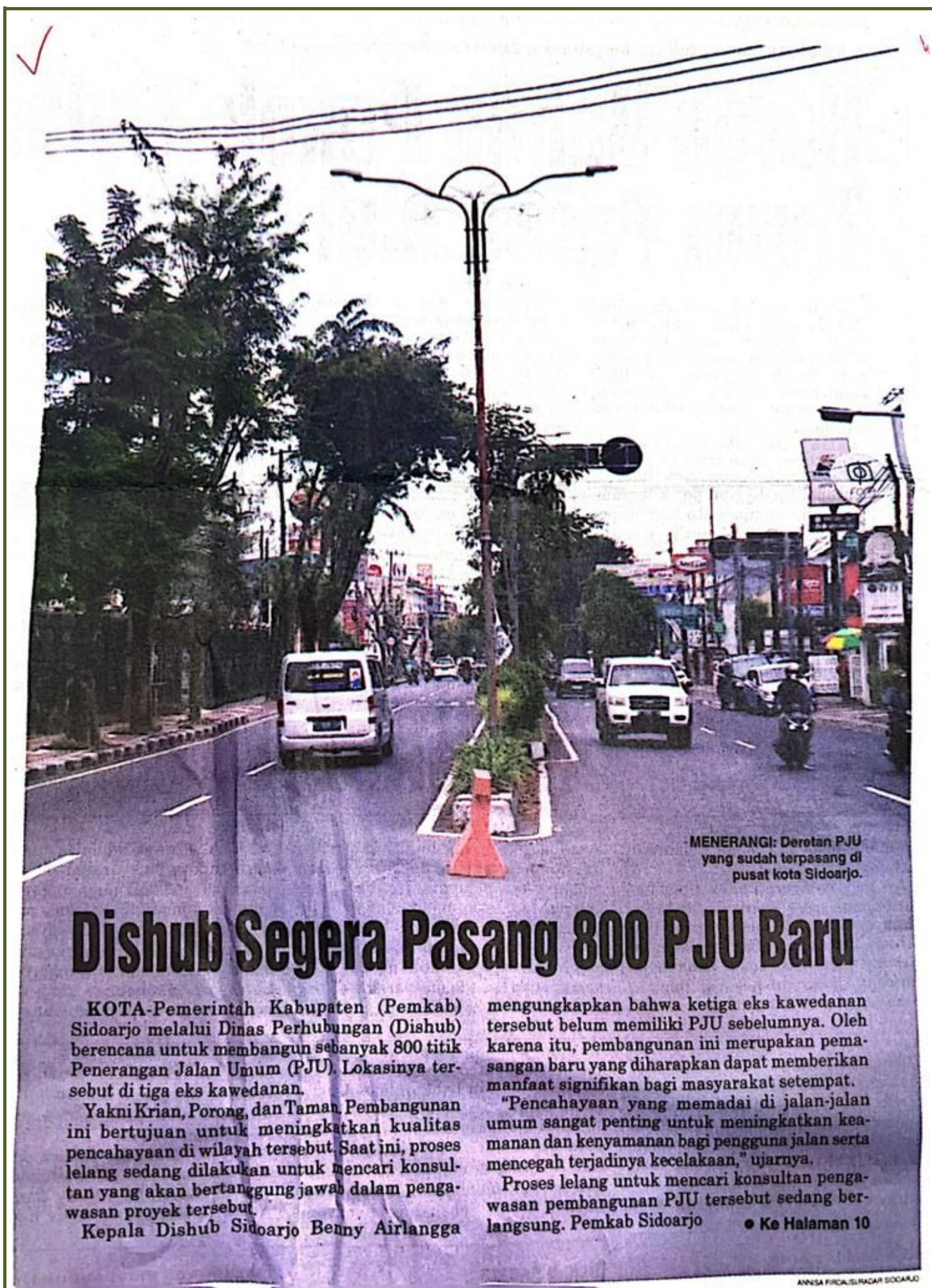
Menurut Sunu, tiga titik tersebut sampai saat ini kerap mengalami kepadatan saat volume kendaraan tinggi. Namun, pihaknya hanya mengoptimalkan TL serta rambu

yang ada dan pengaturan manual. "Karena itu, di tiga titik tersebut juga kami tempatkan petugas saat pagi dan sore," katanya. "Sementara begitu karena memang masih terimbas pembangunan *flyover*," lanjutnya.

Sementara itu, sampai saat ini pembangunan *flyover* Aloha masih sekitar 55 persen. Manajer Konstruksi Flyover Aloha Muhammad Sadiqin mengatakan, pihaknya masih menuntaskan pembangunan tiang pancang jembatan. "Saat ini proses *stressing girder* dan pengerjaan *retaining wall* di sisi timur dan utara atau di tiap ujung *flyover*," jelasnya. (uzi/c7/any)

KOMUNIKASI LEGISLATIF

Ciri Wajon



✓

MENERANGI: Derotan PJU yang sudah terpasang di pusat kota Sidoarjo.

Dishub Segera Pasang 800 PJU Baru

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana untuk membangun sebanyak 800 titik Penerangan Jalan Umum (PJU). Lokasinya tersebut di tiga eks kawedanan.

Yakni Krian, Porong, dan Taman. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencahayaan di wilayah tersebut. Saat ini, proses lelang sedang dilakukan untuk mencari konsultan yang akan bertanggung jawab dalam pengawasan proyek tersebut.

Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga mengungkapkan bahwa ketiga eks kawedanan tersebut belum memiliki PJU sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan ini merupakan pemasangan baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat.

"Pencahayaannya yang memadai di jalan-jalan umum sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mencegah terjadinya kecelakaan," ujarnya.

Proses lelang untuk mencari konsultan pengawasan pembangunan PJU tersebut sedang berlangsung. Pemkab Sidoarjo

● Ke Halaman 10

ANNISA FIRDAUSI/RADAR SIDOARJO

Dishub Segera...

melalui Dishub telah melibatkan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang ini untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Konsultan pengawasan nantinya akan bertugas untuk memantau pe-

laksanaan pembangunan PJU, mengawasi kualitas pekerjaan, serta memastikan bahwa proyek ini selesai tepat waktu.

Menurut dia, pembangunan 800 PJU itu juga akan menjadi langkah penting bagi Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, proyek ini dapat segera

dimulai setelah lelang selesai dan berjalan lancar hingga penyelesaian.

Benny juga berharap partisipasi serta pengawasan dari masyarakat dalam melaporkan apabila ada wilayah yang belum terpasang PJU atau ada kerusakan. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara efisien. (nis/vga)

Istri Bupati Sidoarjo Beri Pembinaan Administrasi Lembaga Bagi Istri Kades dan Sekolah TK



SOSIALISASI - Pembina Yayasan DWP Kabupaten Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor mengingatkan pentingnya administrasi kelembagaan bagi TK DWP bersama para istri Kades dan Lurah di kantor Kecamatan Sidoarjo, Jumat (07/07/2023).

Sidoarjo, Memo X

Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Lembaga Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan, Jumat (07/07/2023). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan tanggal 14 - 15 Juni 2023 lalu.

Sosialisasi yang diikuti ibu-ibu Kepala Desa (Kades) dan ibu-ibu Lurah beserta Kepala TK DWP se Kecamatan Sidoarjo ini digelar di Aula Kantor Kecamatan Sidoarjo.

Pembina Yayasan DWP Kabupaten Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan pemerintah saat ini sedang

gencar mensosialisasikan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat anak didik. DWP Kabupaten Sidoarjo mendukung kurikulum merdeka ini. Namun butuh dukungan semua pihak.

"Terutama tenaga pendidik yang ada di sekolah DWP Sidoarjo. Keberhasilan penerapan kurikulum ini, tentunya tidak lepas dari kerja sama dan kekompakan dari tenaga pendidik," ujar istri Bupati Sidoarjo, Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor kepada Memo X, Jumat (07/07/2023).

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Ning Sasha ini menjelaskan sosialisasi dan pembinaan seperti ini bertujuan memperkenalkan metode pembelajaran bagi anak-anak usia dini yang menyenangkan. Metode pembelajaran akan memaksimalkan potensi anak didik ke depan. Hal ini dapat dimulai di usia golden age yakni antara usia 0 sampai 4 tahun.

"Dalam usia golden age, potensi anak-anak dapat berkembang secara maksimal untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas," paparnya.

Istri Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menilai kegiatan ini juga akan dilakukan bertahap di seluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo. (par/wan)



Diskusi (FGD) Prodi Administrasi Publik Umsida.

LOE/UTDA

FGD Menuju Pemilu 2024 yang Berkualitas di Umsida

SIDOARJO - Menjelang pemilu 2024, Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menggelar Gelar Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema "Menuju Pemilu 2024 yang Berkualitas".

Kegiatan dihadiri narasumber Nanang Haromin, seorang pengamat politik yang membahas teknis dan dasar hukum pemilu. FGD membahas secara menyeluruh teknis dan dasar hukum pemilu guna mencapai pemilu yang berkualitas. Acara ini dihadiri oleh seluruh asisten laboratorium Program Studi Administrasi Publik serta mahasiswa semester 6 Prodi Administrasi Publik Umsida.

Nanang Haromin sebagai narasumber mengungkapkan bahwa, pemilu merupakan sebuah konflik yang dilegalkan oleh pemerintah.

"Sesungguhnya tidak ada sistem pemilu terbaik, namun sistem yang cocok bagi Indonesia. Sistem konvensional/sistem pencoblosan memakai paku menjadi kearifan lokal dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan cara tersebut, orang luar mengakui kesuksesan pemilu Indonesia," papar Nanang.

Nanang juga menyoroti pentingnya pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan

terkait pemilihan sistem pemilu. Ia mencontohkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat memperkuat partisipasi pemilih, tetapi juga melemahkan peran partai politik.

"Saya harap problematika pemilu paling 'rumit' pada tahun 2019, tidak akan terulang pada pemilu 2024. Permasalahan tahun 2019 pemilu kemarin. Pemilu yang berkualitas, akan lahir dari penyelenggara pemilu yang berintegritas," terangnya.

Sebagai pengamat politik, Nanang juga mengidentifikasi beberapa problematika dalam sistem pemilihan di Indonesia, antara lain adanya banyak korban jiwa, praktik politik uang, malpraktik, ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya harap pihak KPPS dan penyelenggara pemilu tingkat bawah sebagai wadah awal terciptanya kualitas pemilu juga harus mampu mengawal proses pemilu menuju Indonesia yang berkualitas," terangnya.

Senada Hendra Sukmana, Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, juga menyampaikan kegiatan FGD yang digelar pada Senin (26/6/23) lalu itu memiliki pandangannya bahwa pemilu yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula.

"Pemilu yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Saya harap kedepannya mahasiswa AP bisa mengawal pemilu 2024 dengan bersinergi bersama KPU mensosialisasikan ajakan untuk memilih, menolak politik transaksional, dan menjadi pengawas independen yang berintegritas. Karena muara pemilu adalah melahirkan tokoh-tokoh pembuat kebijakan publik," ujar Hendra kepada duta.co Minggu (9/7/23).

Dari hasil FGD tersebut, beberapa rekomendasi telah dihasilkan. Rekomendasi tersebut meliputi partisipasi politik dan pengawasan oleh mahasiswa dan akademisi untuk menjaga kualitas pemilu yang berintegritas, mendorong penyelenggara pemilu untuk membuka akses data calon legislatif secara transparan, manajemen teknis penyelenggaraan pemilu, sinkronisasi peraturan KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu.

Hal ini guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang baik, pemerintah melakukan sosialisasi partisipasi Daerah Urban dalam pemilihan, pemilih perlu memahami ketentuan dan teknis pemilu, serta kontribusi Umsida dan mahasiswa dalam memberikan inovasi berupa website dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pemilu. ●loe



BERANGSUR KEMBALI: Sejumlah bahan pokok yang dijual di Pasar Porong harganya mulai turun.

Harga Bahan Pokok Mulai Turun Pasca Idul Adha

KOTA-Setelah Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok yang sebelumnya melonjak tajam akhirnya mulai mengalami penurunan. Di Pasar Porong, terlihat penurunan harga pada beberapa bahan pokok yang membuat lega konsumen.

Salah satu bahan pokok yang mengalami penurunan harga adalah daging ayam. Sebelumnya mencapai Rp 45 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 38.500 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang merah yang semula Rp 35.500 per kilogram menjadi Rp 32 ribu per kilogram.

Sedangkan harga bawang putih mengalami penurunan dari Rp 44 ribu menjadi Rp 42 ribu per kilogram. Penurunan harga tersebut tentunya memberikan kelegaan bagi

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, tidak semua bahan pokok mengalami penurunan harga. Harga daging sapi justru mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga daging sapi mencapai Rp 110 ribu per kilogram, namun saat ini naik menjadi Rp 115 ribu per kilogram.

Demikian juga dengan harga cabai rawit yang awalnya Rp 22 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Kenaikan harga itu dapat menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada bahan-bahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Widiyantoro Basuki, penurunan harga bahan pokok ini disebabkan oleh persediaan yang cukup banyak.

Pasokan yang melimpah membuat harga turun.

Terutama setelah Idul Adha dimana permintaan masyarakat cenderung menurun. Pihaknya juga terus melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup.

Meskipun beberapa harga bahan pokok masih mengalami kenaikan, adanya penurunan harga pada beberapa bahan pokok memberikan sedikit keringanan bagi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga di masa-masa sebelumnya.

"Masyarakat diharapkan tetap bijak dalam mengatur pengeluaran serta memanfaatkan harga yang lebih terjangkau ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (nis/vga)

Cabor Dayung Sidoarjo Siap Tempur pada Porprov Jatim VIII



Tim dayung Provinsi Jawa Timur, saat penyerahan medali dalam Kejurnas Dayung Junior dan K15, di kuantan Singingi, Riau.

Sidoarjo, Bhirawa

Atlet dayung dari Kabupaten Sidoarjo berkontribusi dalam Kejurnas Dayung Yuniior dan K15, di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Manajer kontingen Jawa Timur, Gatot Yos Sudarso, Minggu (9/7) kemarin, menyampaikan ada 14 atlet dayung Jawa Timur yang diturunkan dalam Kejurnas yang digelar sejak 1 Juli hingga 4 Juli 2023 itu. Tim dayung Jawa Timur, meraih satu medali emas, tiga medali perak dan satu medali perunggu. Dari 14 atlet yang diturunkan tim Jawa Timur itu, 5 atlet berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Lima lima atlet be-

rasal dari Kabupaten Sidoarjo itu, 2 atlet termasuk yunior dan 3 atlet masuk dalam K-15.

"Syukur Alhamdulillah, Tim Dayung Sidoarjo mampu berkontribusi untuk Tim Jawa Timur," kata Yos, Panggilan Gatot Yos Sudarso.

Dengan kemampuan atlet dayung Sidoarjo dalam Kejurnas tersebut, Yos optimis Tim Dayung Kabupaten Sidoarjo akan siap tempur pada Porprov Jatim tahun 2023, yang digelar pada Bulan September.

"Kami mempunyai atlet andalan, semoga bisa meraih medali emas pada nomor yang dipertandingkan," harapnya. [kus.fen]

Jawa Pos